

APBD PERUBAHAN DKI TERLAMBAT

## Ketua Komisi E DPRD: Kasus Gagal Ginjal Akut Terpaksa Pakai BTT

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria menilai APBD Perubahan DKI yang diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) tidak memiliki risiko. Namun, ada kendala yang dihadapi dalam menghadapi kondisi terdesak seperti kasus gagal ginjal akut.

"Ngga ada risiko, sih. Cuma kita hilang kesempatan untuk melakukan sesuatu. Umpamanya, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Akhirnya kita tidak bisa lakukan karena, kan pakai yang lama semuanya," kata Iman saat ditemui di ruang rapat Komisi E, Selasa (25/10).

Soal program prioritas APBD Perubahan DKI, Iman mengatakan tidak ada perubahan, kecuali masalah gaji.

"Engga ada penambahan, kecuali untuk masalah gaji, masalah TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) yang belum dipenuhi atau masalah utang yang sifatnya itu bukan proyek, darsak (dasar dan mendesak)," ujarnya.

Salah satu masalah yang dimaksud, ujar dia, soal kasus gagal ginjal akut yang tergolong dalam kategori darsak.

"Kayak gagal ginjal akut kan darsak sebenarnya. Tiba-tiba dibutuhkan untuk pembelian obat yang tidak dianggarkan atau peningkatan rumah sakit, diperuntukkan dan lain-lain itu bisa menggunakan dana BTT (Biaya Tidak Terduga)," kata Iman.

Ihwal program prioritas dalam APBD Perubahan DKI, Iman berharap dapat berjalan dengan baik.

"Ini udah selesai. Udah selesai. Kemarin sudah dibahas juga walaupun saya ngga ikut, kan sudah ada wakil sekretaris. Kita lihat di 2023, lah,

semoga 2023 bisa berjalan dengan baik," ucapnya.

Penyebab APBD Perubahan DKI Tak Disahkan dengan Perda APBD Perubahan DKI terpaksa disahkan melalui Pergub karena pembahasan molor dari jadwal.

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, hal itu terjadi karena Pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan mepep menyerahakan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022 atau APBD Perubahan 2022.

"Kalau KUPA-PPAS saja baru diserahkan pada tanggal 27 September, bagaimana memahaminya," kata dia saat dihubungi, Jumat, 21 Oktober 2022. "Akhirnya molor agenda pembahasannya."

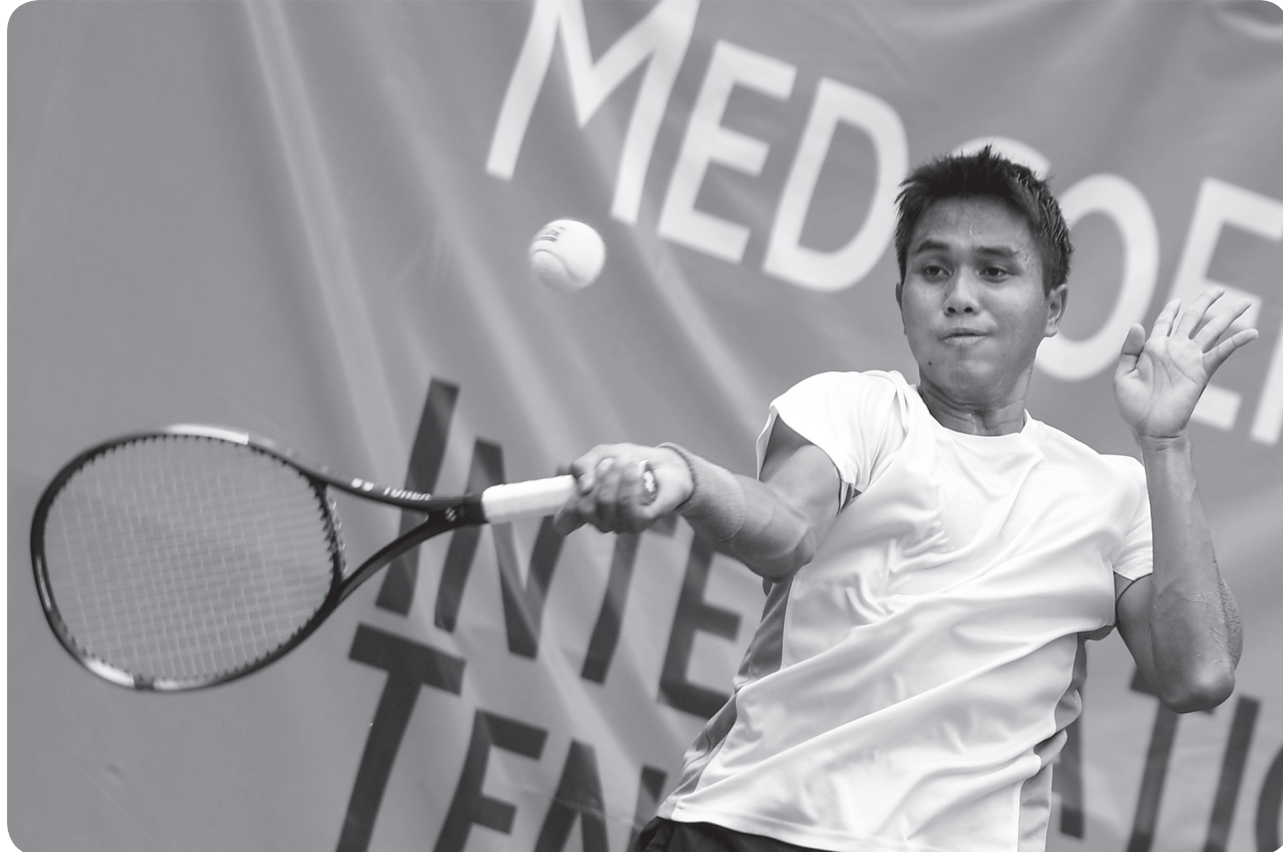
Gembong menerangkan pembahasan APBD Perubahan 2022 semestinya rampung 30 September. Itu artinya, DPRD hanya memiliki waktu tiga hari untuk membahasnya.

Karena pembahasan molor dari jadwal, APBD Perubahan DKI 2022 hanya dicantumkan dalam Peraturan Gubernur yang nantinya diteken Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Dampaknya adalah legislatif tak bisa menambah atau mengurangi nilai anggaran saat pembahasan APBD Perubahan 2022 dengan eksekutif. Pemerintah DKI hanya melaporkan pengeseran alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2022.

DPRD hanya tinggal memantau apa saja anggaran yang bersifat darurat dan mendesak, sehingga harus dimasukkan dalam APBD Perubahan DKI 2022. ● yan

# 4 | Metropolis

FOTO/ANT



## M RIFQI FITRIADI LOLOS 16 BESAR

Petenis M Rifqi Fitriadi berusaha mengembalikannya ke petenis Korea Selatan Ji Hoon Son pada babak 32 besar Medco Energi International Tennis Championships 2022 ITF Mens World Tennis Tour M25 di lapangan The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Selasa (25/10). M Rifqi Fitriadi lolos ke babak 16 besar turnamen tenis internasional itu setelah mengalahkan Ji Hoon Son dengan skor 4-6, 6-1, dan 6-4.

## KSPI Sebut Kebijakan Pengaturan Jam Kerja di Jakarta akan Beratkan Pekerja

Dari sisi pekerja, kebijakan ini dikatakan akan sangat memberatkan. Pasalnya, mayoritas pekerja di Jakarta adalah masyarakat urban yang bertempat tinggal di luar Jakarta atau kebanyakan tinggal di Bodetabek sehingga ritme sosial dan istirahat pasti terganggu.

JAKARTA (IM) - Menganggapi rencana pengaturan jam kerja di Jakarta, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa hal itu bukan persoalan sepele atau tidak. Tetapi, lanjutnya, ini lebih kepada apakah kebijakan itu akan mengganggu ritme

bisnis dan sosial para pekerja atau tidak.

"Dari sisi perusahaan, mereka punya kewajiban *delivery on time* untuk mengirim produk dan jasanya, terutama yang orientasi ekspor. Nah, jam kerja negara tujuan ekspor tentu berbeda dengan jam kerja di Indonesia. Misal di Jepang dan Eropa masih pagi

tapi di Indonesia sudah malam. Sehingga ritme jam kerja operasional pabrik dan pekerjaan administrasi perusahaan akan terganggu," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (25/10).

Sementara itu, dari sisi pekerja, kebijakan ini dikatakan akan sangat memberatkan. Pasalnya, mayoritas pekerja di Jakarta adalah masyarakat urban yang bertempat tinggal di luar Jakarta atau kebanyakan tinggal di Bodetabek sehingga ritme sosial dan istirahat pasti terganggu.

"Yang kena jam kerja pagi pasti berangkat pagi-pagi sekali sehingga mengabaikan perannya untuk anak yang harus berangkat sekolah. Sementara yang terkena jam kerja

agak siang pasti pulang malam sekali sehingga jam tidur mereka dan keluarga bisa terganggu," tegas Said.

Dengan ritme kerja seperti ini, menurutnya, akan berakibat pada produktivitas pekerja yang akan semakin menurun.

Menurut Said, sebaiknya kebijakan ini dikaji terlebih dahulu dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta diharapkan menuntaskan dan memperluas sistem transportasi publik

massal yang terkoneksi dan terintegrasi meliputi Trans Jakarta, LRT, MRT, hingga dapat mencakup seluruh area Jabodetabek.

"Dengan kebijakan apapun, pasti kemacetan tetap ada selama produksi mobil dan motor tidak dikontrol dan tidak diimbangi pengembangan ratio ruas jalan dan sistem *mass public transportation* seperti yang dilakukan di Geneva Swiss," pungkasnya. ● yan

## Pemkot Jaksel: Satu Anak Sembuh dari Gagal Ginjal Akut

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan mengungkapkan satu dari 11 anak di wilayah itu telah dinyatakan sembuh dari gagal ginjal akut.

"Sebelas anak mengidap gagal ginjal akut di Jaksel, tetapi satu orang sudah sembuh," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan (Jaksel), Yudi Dimiyati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (25/10).

Yudi menerangkan, data pasien pengidap gagal ginjal akut tersebut pada Juli sampai Oktober 2022 merupakan anak di bawah lima tahun (balita). Anak yang telah sembuh tersebut merupakan kasus pertama yang ditemukan gagal ginjal akut di wilayahnya pada Juli lalu.

Dia menambahkan, 10 dari 11 anak tersebut belum diketahui informasi terburunya dari pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) apakah sudah sembuh atau belum.

Namun, dia menambahkan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan saat ini sudah ada yang sembuh.

Hal ini didukung dengan laporan Kementerian Kesehatan RI yang menda sebanyak 38 dari total 245 pasien gangguan ginjal akut di Indonesia dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. "Jumlah itu didata per 23 Oktober 2022 berdasarkan laporan yang masuk ke Kemenkes," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Senin (25/10).

Selain itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyebutkan 26 vial obat Fomepizole (10 vial obat Fomepizole dari Singapura dan 16 dari Australia) untuk pengobatan gangguan ginjal akut progresif atipikal (*atypical progressive acute kidney injury*) telah dibawa ke Tanah Air pada Minggu (23/10). ● yan



FOTO/ANT

## PEMBANGUNAN JPO KLENDER

Pekerja menyelesaikan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan Stasiun Klender Baru, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Selasa (25/10). Menurut Dinas Bina Marga DKI Jakarta pembangunan JPO direncanakan akan rampung pada bulan Desember 2022 mendatang guna memudahkan pejalan kaki menyeberangi jalan menuju Stasiun Klender Baru.

## Polisi dan Dinkes Bekasi Sambang Pedagang Obat di Pasar Proyek

BEKASI (IM) - Polres Metro Bekasi Kota bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bekasi mendatangi sejumlah toko di Pusat Obat dan Alat Kesehatan Pasar Proyek, Bekasi Timur. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penjualan obat sirup yang mengandung etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) melebihi ambang batas aman.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki mengatakan, pihaknya bersama unsur terkait untuk memberikan imbauan ke para pedagang agar tidak menjual lima obat sirup tersebut ke masyarakat. Polisi, sambung Hengki, akan turut mengawasi peredaran kelima obat sirup yang telah dilarang serta ditarik peredarannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Untuk yang lima dilarang ini agar tidak diedarkan dan ditarik. Terhadap yang belum diuji BPOM, sudah ada surat imbauan dari Kemenkes. Dinkes sudah meneruskan kepada apotek-apotek (obat) yang ada untuk dikarantina, artinya tidak dijual dan diedarkan sambil menunggu Kemenkes," kata Hengki, Selasa (25/10).

Hengki menegaskan, akan menindak para pedagang yang masih nekad menjual lima jenis obat sirup tersebut.

Sementara, Kepala Sub Koordinator Kefarmasian Dinkes Kota Bekasi, Rudi Hartono menjelaskan, selain diberikan imbauan, juga memberikan pengetahuan tentang bahaya penggunaan obat sirup tersebut ke masyarakat terutama pedagang.

Kedepan mudah-muda-

han uji lab yang menyusul akan bertumbuh supaya memberikan kenyamanan kepada tenaga kesahatan, masyarakat ataupun sarana kefarmasian untuk menyalurkan obat-obatan tersebut," jelas Rudi.

Sebelumnya, BPOM melakukan penelusuran dan pengujian terhadap dugaan cemaran EG dan DEG dalam sirup obat. Pengujian dilakukan menyusul merebaknya kasus gangguan ginjal akut.

Namun BPOM menyatakan bahwa penelusuran mereka menemukan bahwa mayoritas obat sirup yang beredar di masyarakat saat ini aman.

Berikut daftar 5 obat sirup yang diperintahkan untuk ditarik peredarannya oleh BPOM:

1. Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DT-L0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

3. Unibebe Cough Sirup (obat batuk dan flu), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL7226303037A1, kemasan Dus, Botol Plastik @ 60 ml.

4. Unibebe Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.

5. Unibebe Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml. ● yan

BERKAS PTSL SUDAH DIAJUKAN SEJAK FEBRUARI

## Warga Bekasi Keluhkan Sertifikat Tanah yang tak Kunjung Terbit

BEKASI (IM) - Sejumlah warga mengeluhkan tentang lamanya proses penerbitan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ada di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya mengeluhkan tentang penerbitan sertifikat yang memakan waktu berbulan-bulan. "Saya dari Februari sampai sekarang ini belum terbit (sertifikatnya)," ujar warga tersebut, Selasa (25/10).

Selain penerbitan sertifikat yang lama, ia juga mengatakan praktek pungli dalam PTSL masih dijalankan. Warga yang ingin mengganti berkas sertifikat dipungut biaya Rp 10.000 dikali luas ukuran tanah.

"Belum lama ini, ada sebagian warga dari RT lain yang sudah dibagi-bagi, tapi tetap masih dikenakan biaya Rp 10.000 dikali luas tanah," ujar dia.

Salah seorang warga lain, bernisial G, merasakan hal yang sama. Ia menyebut bahwa sertifikat tanahnya tak kunjung terbit meski telah diproses

berbulan-bulan. Dirinya bahkan sudah mengeluarkan uang hingga Rp 3,6 juta untuk dua sertifikat yang ingin diterbitkan.

"Katanya sih bertahap (penerbitan sertifikat), tapi enggak tahu kelanjutannya seperti apa. Saya punya dua titik, sudah kasih biaya Rp 3,6 juta," ujar G.

Ia pun hanya bisa menunggu sambil berharap sertifikat tanahnya dapat segera terbit. "Saya juga berharap banget itu (sertifikat tanah) terbit. Namanya surat enggak ada di tangan kita, takut disalahgunakan," harap G. ● yan

## Pj. Bupati Resmikan Charging Station Pertama di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi

FOTO: DOK. PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI

CIKARANG PUSAT (IM) - Pj. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan meresmikan Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik atau Charging station pertama di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi yang terletak di Halaman Kantor Bank BJB KCP Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (24/10). Dengan ini, Kabupaten Bekasi menjadi daerah Kabupaten/Kota pertama di Indonesia yang memiliki charging station di komplek perkantoran pemerintahannya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya memberikan apresiasi atas setinggi-tingginya atas kepedulian dan aksi konkret Bank BJB, yang telah mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjadikan Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang lebih ramah lingkungan.

"Saya sangat mengapresiasi Bank BJB yang telah membuat charging station yang sangat representatif, dan tentu lokasinya ini juga mudah diakses oleh masyarakat," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (25/10).

Dani berharap, dengan diresmikannya charging station tersebut, kedepannya dapat mendorong masyarakat Kabupaten Bekasi untuk beralih ke penggunaan mobil listrik. Karena mobil listrik dinilai ramah lingkungan, dan lebih murah dibanding menggunakan BBM.



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (kiri) saat meresmikan Stasiun Pengisian Daya Kendaraan Listrik atau Charging Station pertama di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Senin (24/10).

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong pengelola kawasan untuk membangun charging station di berbagai kawasan industri, agar bisa

memasifkan penggunaan mobil listrik.

"Kita patut bangga Kabupaten Bekasi merupakan pusat industri otomotif termasuk

mobil listrik. Oleh karena itu, Kabupaten Bekasi juga menjadi pelaksana pertama dari Instruksi Presiden mengenai penggunaan mobil listrik ini

yang ramah lingkungan," imbuhnya.

Selain meresmikan charging station, Dani Ramdan juga meresmikan Taman Digital yang merupakan taman rekreasi, di mana taman tersebut juga menyediakan berbagai UMKM yang telah menjadi binaan Bank BJB untuk membantu pertumbuhan perekonomian UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Pembayaran yang dilakukan dalam transaksi di Taman Digital juga dapat dilakukan menggunakan pembayaran digital dengan QRIS.

Tak hanya itu, pemberian 1.000 tumbler secara simbolis juga diserahkan oleh Pj. Bupati Bekasi dan Bank BJB kepada anak-anak Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai upaya untuk membiasakan generasi muda mengurangi sampah plastik dengan tidak menggunakan minuman kemasan sekali pakai.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Bank BJB Cikarang, Arfandi, pembuatan Taman Digital ini merupakan upaya Bank BJB untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Bekasi. Serta pemberian donasi tumbler juga dilakukan agar lebih terkontrol kebersihan daerah Kabupaten Bekasi dan membiasakan anak-anak lebih menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

"Semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi," pungkasnya. ● mdl